

ABSTRAK

Zahra: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO.101/Pid.B/2021/PN Blb TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, yang saat ini menurut penulis seringkali terjadi adalah tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri yang sering kali terjadi di Indonesia adalah pengeroyokan. Seperti halnya dalam kasus kekerasan dengan tenaga bersama-sama atau tindak pidana pengeroyokan yang penulis angkat dalam putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Blb, para terpidana dinyatakan bahwa pelaku dipidana dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb. Kedua mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Bandung dalam Putusan No.101/Pid.B/2021/PN Blb. Ketiga mengetahui analisis yuridis terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb.

Kerangka berfikir penelitian ini adalah teori pembedaan gabungan atau teori modern yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) menganalisis Putusan Pengadilan Negeri dikaitkan dengan teori hukum yang berlaku.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan seluruh unsur Pasal 315 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam putusan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN. Kedua, pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb telah memenuhi syarat-syarat-syarat obyektif dan syarat subyektif. Ketiga, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb, yaitu lebih tepat diterapkan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, sedangkan pertimbangan hakim majelis hakim memilih Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidaklah salah akan tetapi sedikit kurang tepat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengeroyokan, Pembedaan